



eISSN [3090-174X](#) & pISSN [3090-1367](#)

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/t3scz413

Hal. 1371-1377

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Beranda Jurnal <https://indojurnal.com/index.php/jisoh>

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam Penanganan Kejahatan Korporasi Perusak Lingkungan: Sebuah Kajian *Green Criminology* di Kabupaten Pelalawan

Arsyllia Natasyah¹, Rio Tutrianto²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia^{1,2}

*Email: arsyllianatasya30@gmail.com, riotutrianto@soc.uir.ac.id

Diterima: 27-04-2026 | Disetujui: 02-05-2026 | Diterbitkan: 04-05-2026

ABSTRACT

This research aims to examine the role of Civil Servant Investigators (PPNS) at the Department of Environment and Forestry (DLHK) in addressing corporate crimes that cause environmental damage in Pelalawan Regency from an environmental criminology perspective. It is motivated by increasing corporate activities in plantation and forestry sectors, which often lead to pollution, deforestation, and violations of environmental permits. Empirical findings indicate significant impacts on ecosystems and local communities, requiring active involvement from PPNS. This study applies a qualitative descriptive approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Informants include PPNS officers, law enforcement officials, and affected communities. The analysis focuses on the role of PPNS in investigation processes, evidence collection, and inter-agency coordination. The results reveal that PPNS play a vital role in enforcing environmental law, both administratively and criminally, but face challenges such as limited human resources, inadequate facilities, difficulties in proving corporate crimes, and weak coordination. Therefore, strengthening capacity, coordination, and environmental restoration policies is essential.

Keywords: *PPNS, corporate environmental crime, environmental damage, environmental law enforcement, green criminology, DLHK, Pelalawan Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam menangani kejahatan korporasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Pelalawan melalui perspektif kriminologi lingkungan. Latar belakang penelitian ini adalah bertambahnya kegiatan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang berpotensi menyebabkan pencemaran, deforestasi, serta pelanggaran izin. Data di lapangan menunjukkan adanya pengaruh konkret pada ekosistem dan masyarakat yang memerlukan partisipasi aktif PPNS. Metode penelitian mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari PPNS DLHK, penegak hukum, dan masyarakat yang terkena dampak. Analisis terfokus pada peran PPNS dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, serta kolaborasi antar lembaga. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa PPNS berperan vital dalam penegakan hukum lingkungan, baik secara administratif maupun pidana, namun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, pembuktian, dan koordinasi. Studi ini mengusulkan pengembangan kapasitas PPNS, penguatan kerja sama, serta kebijakan tegas yang berfokus pada pemulihan lingkungan.

Kata kunci: PPNS, kejahatan korporasi, kerusakan lingkungan, penegakan hukum lingkungan, green criminology, DLHK, Kabupaten Pelalawan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Natasyah, A., & Tutrianto, R. (2026). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam Penanganan Kejahatan Korporasi Perusak Lingkungan: Sebuah Kajian Green Criminology di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1371-1377. <https://doi.org/10.63822/t3scz413>

PENDAHULUAN

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Riau yang memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan dan kehutanan. Letaknya yang berada di jalur transportasi utama serta kondisi geografis yang relatif datar menjadikan wilayah ini sangat mendukung pengembangan berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (BBSDLP, 2019). Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas korporasi di sektor perkebunan dan kehutanan, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul, seperti pencemaran limbah, deforestasi, serta pelanggaran terhadap izin lingkungan. Data menunjukkan bahwa pada periode 2024–2025 terdapat kasus kejahatan korporasi yang berdampak pada kerusakan ekosistem di Kabupaten Pelalawan, termasuk aktivitas perusahaan yang menyebabkan perubahan kondisi tanah, air, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan adalah pembangunan fasilitas tanpa izin lingkungan serta perubahan aliran sungai yang berdampak pada ekosistem perairan dan kehidupan masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak lingkungan secara fisik, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dalam perspektif green criminology, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai eco-crime karena merugikan lingkungan dan makhluk hidup yang bergantung padanya (White, 2013).

Selain itu, kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi juga termasuk dalam kategori white-collar environmental crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh entitas bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, namun berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan (Mongabay, 2024). Kejahatan ini memiliki karakteristik kompleks karena dilakukan dalam struktur organisasi perusahaan yang terorganisir, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas struktur perusahaan yang menyulitkan dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Selain itu, proses pembuktian yang memerlukan pendekatan ilmiah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus (Surbakti & Azheri, 2025).

Dalam konteks ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki peran penting dalam penegakan hukum lingkungan. PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan, termasuk mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Peran tersebut menjadikan PPNS sebagai garda terdepan dalam menangani kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya peran PPNS belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta tantangan dalam menghadapi korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang besar. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus (Taufiqurrahman et al., 2022).

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam Penanganan Kejahatan Korporasi Perusak Lingkungan: Sebuah Kajian Green Criminology di Kabupaten Pelalawan
(Natasyah, et al.)

Pendekatan green criminology menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ini karena tidak hanya melihat kejahatan dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi kerusakan ekologis dan ketidakadilan lingkungan yang ditimbulkan. Perspektif ini menekankan bahwa korban kejahatan lingkungan tidak hanya manusia, tetapi juga ekosistem dan keanekaragaman hayati yang terdampak (Beirne & South, 2013)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kejahatan korporasi perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan. Fokus penelitian ini meliputi peran PPNS dalam penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada kasus di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau untuk menggali lebih dalam peran PPNS dalam menangani kejahatan korporasi lingkungan, termasuk proses penyelidikan dan kendala yang dihadapi (Brisman & South, 2019). Metode ini dipilih karena dapat mendeskripsikan fenomena sosial secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan analisis induktif (Sugiyono, 2013). Tempat penelitian terletak di DLHK Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini mencakup PPNS DLHK, Kepala Tim Penegakan Hukum, Kanit Tipiter Polres Pelalawan, serta masyarakat yang terpengaruh, diambil berdasarkan partisipasi langsung mereka dalam penanganan isu-isu lingkungan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, serta data sekunder seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menafsirkan data guna memahami pola, keterkaitan, serta makna dari fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) memiliki peran yang cukup signifikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi perusak lingkungan di Kabupaten Pelalawan. Peran tersebut dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu administratif dan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam praktiknya, PPNS menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Proses ini dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi, hingga pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen perusahaan, serta bukti ilmiah seperti uji laboratorium terhadap air, tanah, dan udara. Selain itu, PPNS juga berperan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab melalui analisis struktur organisasi korporasi serta keterlibatan individu di dalamnya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Pelalawan terdapat berbagai kasus

kejahatan korporasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pelanggaran izin, serta deforestasi. Kasus-kasus tersebut tidak hanya ditangani oleh DLHK, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya serta laporan dari masyarakat dan media (DLHK, 2025; Mongabay, 2024). Hal ini menegaskan bahwa kejahatan lingkungan oleh korporasi merupakan fenomena yang nyata dan kompleks.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, di mana jumlah PPNS yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk fasilitas laboratorium dan dukungan teknologi, turut menghambat proses penyidikan.

Kendala lainnya adalah kesulitan dalam pembuktian kasus, yang harus dilakukan secara ilmiah dan memerlukan keterlibatan tenaga ahli. Proses ini tidak hanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi juga biaya yang besar. Di samping itu, karakteristik korporasi yang memiliki struktur kompleks serta kekuatan ekonomi yang besar juga menyulitkan dalam penentuan pertanggungjawaban hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan kasus (Taufiqurrahman et al., 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PPNS memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum lingkungan, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal karena berbagai kendala struktural dan teknis.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PPNS dalam penanganan kejahatan korporasi lingkungan sejalan dengan perspektif green criminology, yang menekankan pentingnya perlindungan lingkungan serta keadilan ekologis. Dalam pandangan ini, kejahatan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk kerusakan terhadap ekosistem dan ketidakadilan terhadap makhluk hidup yang terdampak (White, 2013).

Kejahatan korporasi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan memperlihatkan bahwa dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan yang luas dan berjangka panjang, seperti degradasi tanah, pencemaran air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan pendapat Beirne dan South (2013) yang menyatakan bahwa kejahatan lingkungan memiliki konsekuensi ekologis yang serius dan sering kali tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

Meskipun PPNS telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, efektivitas penegakan hukum masih terbatas. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas struktur korporasi yang menyulitkan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, pembuktian terhadap kejahatan lingkungan memerlukan pendekatan ilmiah yang tidak sederhana, sehingga memperlambat proses hukum (Mahendra et al., 2021).

Selain faktor tersebut, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal juga menjadi kendala dalam penanganan kasus. Dalam banyak kasus, penanganan kejahatan lingkungan memerlukan kerja sama antara PPNS, kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya. Kurangnya sinkronisasi dan komunikasi antar lembaga dapat menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif (Taufiqurrahman et al., 2022).

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penanganan kejahatan lingkungan membutuhkan pendekatan multidisiplin, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga

melibatkan aspek teknis, sosial, dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum (Handoko & Warka, 2019).

Dalam perspektif green criminology, kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan ekologis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pencegahan, pengawasan, serta pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dalam penanganan kejahatan korporasi di Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. PPNS memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum lingkungan, baik melalui mekanisme administratif maupun pidana, mulai dari tahap penerimaan laporan hingga penyidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum masih lebih dominan pada pendekatan administratif dibandingkan pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap korporasi pelaku. Selain itu, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga turut mempengaruhi efektivitas kinerja PPNS. Dalam perspektif green criminology, kondisi ini mencerminkan bahwa kejahatan lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan ekologis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah, khususnya DLHK, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya PPNS melalui pelatihan berkelanjutan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses penyidikan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan agar penegakan hukum dapat berjalan secara terpadu dan efektif. Penegakan sanksi terhadap korporasi juga perlu diperketat, baik secara administratif maupun pidana, untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang. Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum hendaknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan pemulihan lingkungan serta perlindungan masyarakat terdampak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam efektivitas penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk analisis kebijakan dan perbandingan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Beirne, P., & South, N. (2013). *Issues in green criminology: Confronting harms against environments, humanity and other animals*. London: Willan Publishing.
- Brisman, A., & South, N. (2019). *Green criminology: Crime, justice, and the environment*. New York: Routledge.

- DLHK. (2025). *Data kasus kejahatan lingkungan di Kabupaten Pelalawan tahun 2024–2025*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Handoko, W., & Warka, M. (2019). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan*.
- Mahendra, A., et al. (2021). Kejahatan korporasi dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mongabay Indonesia. (2024). Laporan deforestasi dan kejahatan lingkungan di Indonesia. <https://www.mongabay.co.id>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R., & Azheri, B. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Taufiqurrahman, et al. (2022). Kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- White, R. (2013). *Environmental harm: An eco-justice perspective*. Bristol: Policy Press.